

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andrews, William G., 1968, *Constitutions and Constitutionalism*, Van Nostrand Company, New Jersey.
- Asshidiqie, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Pers, Jakarta.
- _____, Jimly, 2018, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Azhary, M. Tahir, 1995, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta.
- Bahar, Salafroedin, 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 22 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Carr, Robert K., 1942, *The Supreme Court and Judicial Review*, Farrar and Binehart, New York.
- Daliyo, J.B., 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenhallindo, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fauzan, M., 2015, *Peranan PERMA dan SEMA sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, Kencana, Jakarta.
- Gultom, Binsar M., 2015, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2016, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Huda, Ni'matul dan Riri Nazriyah, 2011, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung.

- Huda, Ni'matul, 2018, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kelsen, Hans, 1973, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York.
- Macdonald, R. St. J., F. Matscher, dan H. Petzold, 1993, *The European System for the Protection of Human Rights*, Kluwer Academic Publisher, The Hague.
- Mangungsong, Nurainun, 2010, *Hukum Tata Negara I*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, Yogyakarta.
- Marshall, H.H., 1959, *Natural Justice*, Sweet & Maxwell, London.
- MD, Mahfud, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2011, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2015, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Nawiasky, Hans, 1948, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Benziger, Einsiedeln/Zurich/Koln.
- Pangabean, Henry Pandapotan, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Philips, O. Hood, 2001, *Constitutional and Administrative Law*, Sweet & Maxwell, London.
- Sherif, Adel Omar, 1999, *Separation of Powers and Judicial Independence in Constitutional Democracies: The Egyptian and American Experience*, Kluwer Law International, The Hague/Boston.
- Siahaan, Maruarar, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Soebechi, Imam, 2012, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suwasta, Asep Dedi, 2011, *Tafsir Hukum Positif Indonesia*, Ali Publishing, Bandung.

Thohari, A. Ahsin, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta.

Wade, E.C.S dan G. Godfrey Philips, 1965, *Constitutional Law: An Outline of the Law and Practice of the Constitution, Including Central, and Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law*, Longmans, London.

Wahyono, Padmo, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

Adonara, Firman Floranta, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, 2015.

Arif, Achmad dan Affrizal Berryll Dewantara, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 (Berdasarkan Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* dan Prinsip *Istiqlal Qadha*)”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 13, Nomor 2, 2019.

Asrun, A. Muhammad, “Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum (Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi)”, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2016.

Asyura, Muttaqin, Faisal A. Rani, dan Ilyas Ismail, “Kewenangan Ketua Mahkamah Agung Mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Perihal Penyempahan Advokat”, *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 3, Nomor 3, 2019.

Aziz, Machmud, “Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 5, 2010.

Erlangga, Galih dan Dian Agung Wicaksono, “Implikasi Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pada Mahkamah Agung”, *Jurnal Yudisial*, Volume 9, Nomor 2, 2016.

Husma, Nelly Mulia, Faisal A. Rani, dan Syarifuddin Hasyim, “Kewenangan Pengaturan Mahkamah Agung (Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan)”, *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 1, Nomor 1, 2017.

Kartika, Shanti Dwi, “Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi”, *Jurnal Aktual dan Strategis*, Volume 9, Nomor 6, 2017.

Kristinah, Maria Magdalena dan Jumadi Purwoatmodjo, “Analisis Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/06/X/2015 tentang

Penanganan Ujaran Kebencian”, *Jurnal Notarius*, Volume 12, Nomor 1, 2009.

Lailam, Tanto, “Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, 2015.

Lathif, Nazaruddin, “Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat”, *Pakuan Law Review*, Volume 3, Nomor 1, 2017.

Maladi, Yanis, “Benturan Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* dan Asas *Ius Curia Novit*: Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 2, 2010.

Muabezi, Zahermann Armandz, “Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6, Nomor 3, 2017.

Munawaroh, Nafiatul dan Maryam Nur Hidayati, “Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 22, Nomor 2, 2015.

Nasution, Bahder Johan, “Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Inovatif*, Volume 7, Nomor 3, 2014.

Rosana, Ellya, “Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)”, *Jurnal Studi Lintas Agama*, Volume 10, Nomor 2, 2015.

Satory, Agus dan Hotma Pardomuan Sibuea, “Problematisasi Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung secara Materiil sebagai Peraturan Perundang-undangan”, *Pakuan Law Review*, Volume 6, Nomor 1, 2020.

Setiadi, Wicipto, “Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 1, Nomor 1, 2012.

Sullivan, Edward J., “*The Missing Link: Fairness, British Natural Justice, and American Planning and Administrative Law*”, *The American Urban Lawyer*, Volume 11, Nomor 1, 1997.

Wicaksana, Yuristyan Pambudi, “Implementasi Asas *Ius Curia Novit* dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim tentang Keabsahan Penetapan Tersangka”, *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 3, Nomor 1, 2018.

C. Hasil Penelitian

Adriawan, Dian dan Novina Sri Indiraharti, 2001, “Analisis Yuridis Terhadap Asas *Ius Curia Novit* dalam Hukum Acara Perdata”, *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.

Cahyadi, Irwan Adi, 2014, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Fuadah, Akhyaroni, 2014, “Implikasi Asas *Nemo Judex In Causa Sua* dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Konsepsi Negara Hukum di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rani, Nabella Puspa, 2012, “Penerapan Asas *Nemo Judex In Causa Sua* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Putusan Dari 2004 – 2011”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

D. Materi Kuliah

Rahman, Faiz, “Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Materi Kuliah*, Kekuasaan Kehakiman, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Oktober 2020.

E. Internet

Anggono, Bayu Dwi, “Surat Edaran, ‘Kerikil’ dalam Perundang-undangan”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b1f62361f81/surat-edaran-kerikil-dalam-perundang-undangan/>, diakses 20 Maret 2021.

Asshidiqie, Jimly, “Sejarah *Constitutional Review* dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi”, http://jimly.com/makalah/namafile/111/CONSTITUTIONAL_REVIEW__america.pdf/, diakses 30 September 2020.

Azis, Arasy Pradana A., “Legalitas Surat Edaran Bupati yang Mengimbau Pemudik Isolasi Diri”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e9305576ba83/legalitas-surat-edaran-bupati-yang-mengimbau-pemudik-isolasi-diri/>, diakses 20 Maret 2021.

Huda, Miftakhul, “Kamus Hukum: *Ius Curia Novit*”, <http://www.miftakhulhuda.com/2011/02/ius-curia-novit.html/>, diakses 27 September 2020.

Hukum Online, “PP, Peraturan Paling Banyak Diuji di Mahkamah Agung”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e7b2d2c594c/pp-peraturan-paling-banyak-diuji-di-mahkamah-agung/>, diakses 1 Oktober 2020.

Isra, Saldi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial)”, <https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19->

jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html/, diakses 27 September 2020.

Kusumasari, Diana, “Perbedaan *Judicial Review* dengan Hak Uji Materiil”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4257/judicial-review-vs-hak-uji-materiil/>, diakses 1 Oktober 2020.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Tugas dan Pokok Fungsi Mahkamah Agung”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses 3 Oktober 2020.

Pramesti, Tri Jata Ayu, “Sifat Fatwa Mahkamah Agung”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1586/sifat-fatwa-mahkamah-agung/>, diakses 6 Oktober 2020.

Sahbani, Agus, “Menelusuri Jejak dan Daya Ikat Fatwa MA”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a2d918b273a/menelusuri-jejak-dan-daya-ikat-fatwa-ma/>, diakses 5 Oktober 2020.

Yasin, Muhammad, “Kekuatan Hukum Produk-Produk Hukum MA (PERMA, SEMA, Fatwa, SK KMA)”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma/>, diakses 5 Oktober 2020.

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

G. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, tanggal 23 Agustus 2006.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 P/HUM/2009 perihal Pengujian Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Nomor: 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tanggal 9 Desember 2009.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36 P/HUM/2011 perihal Pengujian Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tanggal 9 Februari 2012.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 P/HUM/2015 perihal Pengujian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, tanggal 29 September 2015.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 P/HUM/2018 perihal Pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi, tanggal 24 Juli 2018.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24 P/HUM/2020 perihal Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), tanggal 14 Mei 2020.